



ANALISIS DETERMINAN KRIMINALITAS DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Eleonora Ecky Setyowati¹ Farida Rahmawati²

Article history:

Submitted: 25 Januari 2025

Revised: 17 Februari 2025

Accepted: 24 Februari 2025

Keywords:

Crime;

Education Level;

Poverty;

Unemployment;

Kata Kunci:

Kemiskinan;

Kriminalitas;

Pengangguran;

Tingkat Pendidikan;

Upah Minimum;

Koresponding:

Universitas Negeri Malang,

Jawa Timur, Indonesia

Email:

farida.rahmawati.fe@um.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the determinants of crime and the quality of human resources in East Java Province. The focus of this study is to explore the influence of economic variables on the crime rate in East Java Province in the period 2019-2023. The independent variables studied include Minimum Wage, School Participation Rate, Unemployment Rate, and Poverty Rate, while the dependent variable is the Crime Rate. The method is a quantitative approach and panel data regression analysis techniques through E-views 12. The results of the study indicate that Minimum Wage, Unemployment Rate, and Poverty Rate have a significant effect on the crime rate, while School Participation Rate does not have a significant effect. This study concludes that increasing the Minimum Wage can reduce the crime rate, while increasing unemployment and poverty can increase the crime rate. These results provide important insights for public policy in East Java Province in efforts to reduce crime through improving social welfare and education.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kriminalitas serta kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengaruh variabel ekonomi terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Jawa Timur pada periode 2019-2023. Variabel independen yang diteliti meliputi Upah Minimum, Angka Partisipasi Sekolah, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Kemiskinan, sementara variabel dependen adalah Tingkat Kriminalitas. Adapun metodenya adalah pendekatan kuantitatif dan teknik analisis regresi data panel melalui E-views 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Kemiskinan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas, sementara Angka Partisipasi Sekolah tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan Upah Minimum dapat mengurangi tingkat kriminalitas, sedangkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan dapat meningkatkan tingkat kriminalitas. Hasil ini memberikan wawasan penting bagi kebijakan publik di Provinsi Jawa Timur dalam upaya pengurangan kriminalitas melalui perbaikan kesejahteraan sosial dan pendidikan.

Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Indonesia¹

Email: eleonora.ecky.2104326@students.um.ac.id

PENDAHULUAN

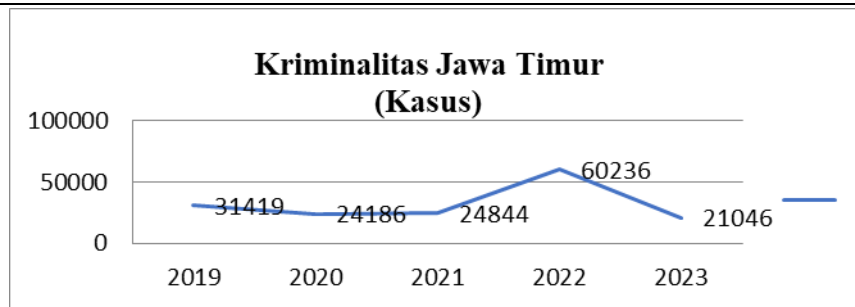
Kriminalitas merupakan masalah sosial yang kompleks dan memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Statistik kriminalitas secara teori menggambarkan jumlah kriminalitas yang ada di Indonesia (Dari & Asnidar, 2022). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu atau kelompok tertentu, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakamanan di lingkungan yang lebih luas. Selain itu, angka kejahatan yang tinggi sering kali menjadi indikator masalah struktural dalam masyarakat, seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan sosial, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan dan peluang kerja.

Menurut penelitian Kesuma (2019) kriminalitas merupakan fenomena yang tidak bisa ditoleransi di masyarakat yang beradab mana pun. Segala perbuatan atau kelalaian yang dilarang dan berpotensi mengganggu ketertiban umum, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan berpotensi dikenakan hukum pidana. Kejahatan merupakan fenomena yang sudah berlangsung sejak lama meskipun berbagai usaha telah dilakukan untuk mengendalikannya (Zahra & Usman, 2023). Indonesia sebagai salah satu negara dengan berpopulasi terbesar di dunia, tidak terlepas atas berbagai permasalahan kriminalitas.

Dalam Priambodo (2024) berbagai jenis kejahatan dapat memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan suatu negara atau wilayah. Tingginya angka kriminalitas sering kali menjadi indikator adanya masalah mendasar dalam masyarakat yang perlu diidentifikasi dan ditangani. Dampak sosial dari kejahatan, seperti meningkatnya rasa takut di tengah masyarakat dan disintegrasi sosial, dapat memperburuk kondisi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu menganalisis dan menggali secara mendalam berbagai faktor yang menyebabkan tingginya angka kejahatan, dan mengembangkan pendekatan yang efisien untuk menanggulangi persoalan ini. Dengan pendekatan yang tepat, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung pembangunan sosial dan ekonomi.

Idealnya, untuk menanggulangi kejahatan di Indonesia, ada beberapa langkah penting yang perlu dilakukan secara terpadu. Perlu dilakukan peningkatan pendidikan dan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan program pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memahami hukum dan akibat dari tindak pidana, sehingga kejahatan dapat dicegah sejak dini. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat juga sangat penting. Pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung keamanan dan ketertiban, sedangkan aparat penegak hukum perlu bertindak tegas dan adil. Selain itu, masyarakat harus dilibatkan dalam upaya menjaga keamanan lingkungan, misalnya melalui sistem keamanan sukarela, agar mereka merasa lebih aman.

Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial juga berperan penting dalam menekan angka kejahatan. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan dan terjaminnya akses yang baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, masyarakat akan memiliki lebih kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, yang pada akhirnya dapat menekan potensi terjadinya kejahatan. Selanjutnya, penegakan hukum yang transparan dan akuntabel memiliki peran krusial. Proses hukum yang adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, sehingga mengurangi rasa ketidakpuasan yang kerap memicu terjadinya tindak pidana. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan kondisi yang ideal untuk memerangi kejahatan di Indonesia, yang pada gilirannya akan meningkatkan keamanan, ketertiban, serta kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat.



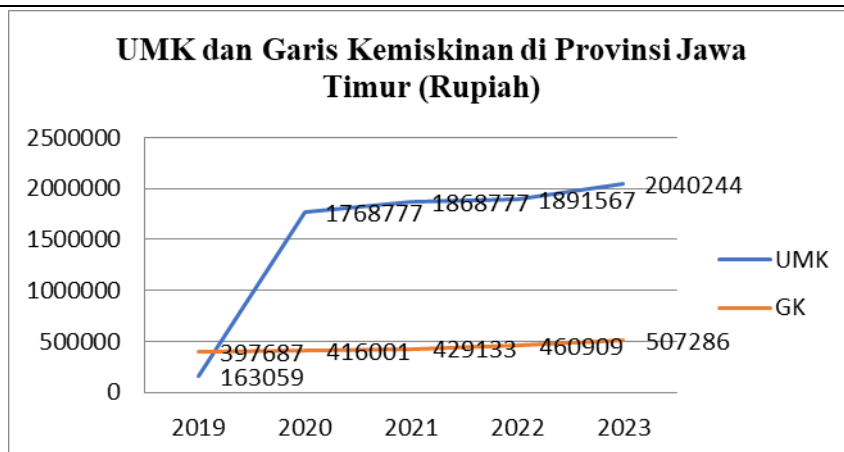
Sumber: BPS, 2025.

Gambar 1. Grafik Perkembangan Jumlah Kriminalitas Provinsi Jawa Timur 2019-2023 (Kasus)

Gambar 1 menunjukkan grafik yang menggambarkan total kasus kriminalitas yang terjadi di Provinsi Jawa Timur 2019-2023. Dalam Gambar 1 terlihat bahwasanya jumlah kasus kriminalitas mengalami fluktuasi selama lima tahun tersebut. Pada tahun 2019, jumlah kasus mencapai 31.419, meningkat pada tahun 2020 menjadi 24.186, sebelum kembali naik ke 24.844 pada tahun 2021. Tahun 2022 mencatat angka tertinggi dengan total 60.236 kasus, tetapi mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi 21.046. Tren ini menunjukkan adanya variasi dalam tingkat kriminalitas di Jawa Timur, di mana puncak kejadian terjadi pada tahun 2022, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Penurunan yang tajam pada tahun 2023 dapat mencerminkan upaya penegakan hukum yang lebih baik atau perubahan dalam kondisi sosial masyarakat.

Dalam konteks ini, berbagai faktor dapat memengaruhi tingkat kriminalitas di suatu daerah. Beberapa faktor penyebab tingginya jumlah kejahatan yaitu seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurang tegasnya suatu hukum, tingginya tingkat pengangguran serta rendahnya upah (Khairani & Ariesa, 2019). Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat ditunjukkan dengan salah satu indikator yaitu besaran upah. Besaran upah ditetapkan melalui kebijakan pemerintah daerah, yang dikenal dengan istilah upah minimum. Upah minimum adalah batas terendah yang tentukan sebagai acuan dalam pemberian upah kepada pekerja oleh pengusaha, dengan tujuan utama memastikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, efisiensi kerja, dan kesejahteraan hidup para pekerja (Anggriawan *et al.*, 2016). Terdapat tujuan adanya upah terendah yaitu kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi. Dengan adanya kenaikan upah minimum, pendapatan masyarakat akan meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tunjangan serta mendukung peran pekerja atau buruh dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan (Putri & Putri, 2021).

Kemiskinan merupakan keadaan dimana kebutuhan dasar individu atau rumah tangga sulit, sementara kesempatan yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan tidak tersedia dalam lingkungan tersebut (Adawiyah, 2020). Masalah kemiskinan dapat dipahami dengan menggambarkan kekurangan materi (tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi), kebutuhan sosial, ketergantungan sosial dan kurangnya pendapatan dan aset seseorang. Masalah social kemiskinan telah ada hampir diseluruh dunia dan ada di sepanjang sejarah manusia (Dulkiah & Nurjanah, 2018). Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi. Artinya, ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai perspektif. Hubungan keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara kemiskinan dan kriminalitas merupakan dua permasalahan social yang sangat sulit untuk diselesaikan. Segala cara akan dilakukan oleh seseorang ketika sedang dalam keadaan krisis keuangan sehingga mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Oleh sebab kriminalitas dapat dipengaruhi secara signifikan oleh kemiskinan (Nisa *et al.*, 2024).



Sumber: BPS,2025.

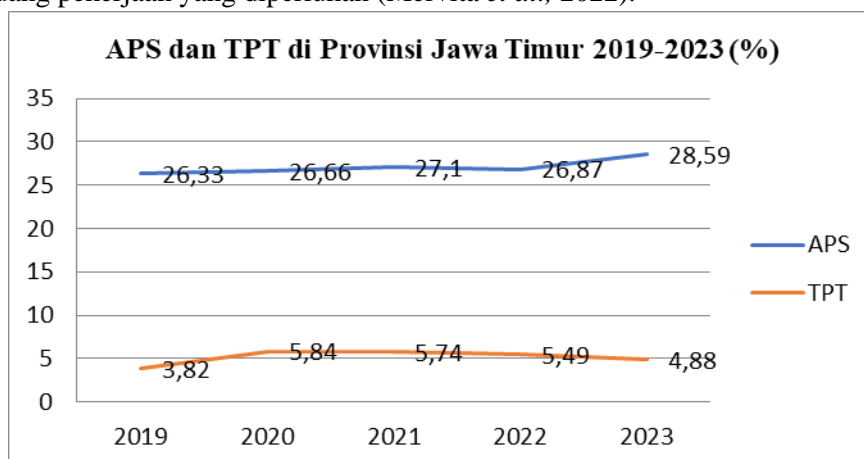
Gambar 2. Grafik Perkembangan UMK dan Garis Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 2019-2023 (Rupiah).

Gambar 2 adalah grafik yang menunjukkan perkembangan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Garis Kemiskinan (GK) di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019-2023. Selama periode tersebut, UMK mengalami peningkatan signifikan dari Rp1.630.059 menjadi Rp2.040.244. Kenaikan UMK berpotensi menurunkan tingkat kriminalitas dengan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar melalui pekerjaan formal. Namun, akses terhadap pekerjaan formal tidak merata, terutama bagi mereka yang terjebak di sektor informal. Sedangkan Kenaikan pada garis kemiskinan dari Rp397.687 menjadi Rp507.286 menciptakan dampak signifikan, meskipun tampaknya tidak terlalu besar. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, meningkatkan jumlah penduduk yang terklasifikasi miskin dan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih hidup di bawah standar minimum, yang dapat memicu aktivitas kriminalitas sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Selain itu Tingkat pendidikan yang rendah dapat memperburuk situasi ini, karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan dapat membatasi peluang kerja yang layak, sehingga meningkatkan risiko keterlibatan dalam aktivitas kriminal. Menurut Rahmalia *et al.*, (2019), dalam perkembangan ekonomi, peranan kualitas modal sangat krusial khususnya dalam meningkatkan kemampuan produksi apalagi jika menggunakan keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu tolok ukur penting dalam pembangunan yang mencerminkan kemampuan sumber daya manusia, sehingga tingkat kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh mutu pendidikan (BPS, 2016). Individu dengan pendidikan yang rendah mungkin memiliki kesempatan yang lebih terbatas untuk memperoleh pekerjaan yang baik dan bisa menghadapi kesulitan dalam mengerti dampak hukum. Dengan demikian, tingkat pendidikan yang rendah dapat memperbesar peluang seseorang untuk terlibat dalam perbuatan kriminal (Saputra, 2023).

Tidak kalah pentingnya, tingkat pengangguran yang tinggi dapat menciptakan frustrasi dan ketidakpuasan di kalangan individu. Menurut Sabiq & Apsari (2021) pengangguran akan melakukan apa saja untuk memperoleh pekerjaan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, banyak juga masyarakat yang menganggur demi memenuhi kebutuhan hidupnya justru melakukan perbuatan yang melanggar norma dan hukum, seperti tindakan kejahatan atau kriminalitas. Ketika lapangan pekerjaan terbatas, orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan mungkin merasa terdesak untuk mencari cara alternatif untuk mendapatkan penghasilan, yang sering kali berujung pada tindakan kriminal. Angka pengangguran yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan masih terdapat tenaga kerja yang

belum teralokasi. Artinya pemerintah perlu memperbaiki sistem penyerapan tenaga kerja, dan menciptakan peluang pekerjaan yang diperlukan (Mervita *et al.*, 2022).



Sumber: BPS, 2025

Gambar 3. Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Usia 19-24 dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur 2019-2023 (%)

Gambar 3 adalah grafik yang menggambarkan perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 19-24 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Timur antara tahun 2019-2023. APS hanya meningkat dari 26,33 persen menjadi 28,59 persen, yang menunjukkan bahwa mayoritas pemuda usia 19-24 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, akibatnya dapat membatasi akses mereka terhadap pekerjaan yang berkualitas. Sementara itu, TPT meningkat dari 3,82 persen menjadi 5,49 persen pada 2022, kemudian turun menjadi 4,88 persen pada 2023. Meskipun mengalami penurunan, pengangguran yang tetap ada dapat menjadi salah satu faktor pendorong kriminalitas. Seseorang yang menganggur cenderung memiliki risiko lebih tinggi terlibat dalam perilaku kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta rendahnya Angka Partisipasi Sekolah dapat mendorong individu untuk mencari cara lain, termasuk melakukan tindakan ilegal. Kondisi ini dapat memicu ketegangan sosial yang berpotensi meningkatkan kriminalitas, terutama di wilayah dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan lapangan kerja.

Semakin tinggi level pendidikan seseorang, semakin luas pengetahuan serta pengalaman yang dimilikinya, yang akan membantu meningkatkan efisiensi kinerja pekerjaannya (Putri & Putri, 2021). Oleh karena itu, penting untuk memperluas akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta menciptakan lapangan kerja yang sesuai, guna mengatasi masalah ini dengan lebih efektif. Terlihat bahwa investasi dalam pendidikan akan berkontribusi pada peningkatan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang akan mempengaruhi peningkatan mutu sumber daya manusia.

Dalam konteks perkembangan sosial dan ekonomi, tingkat kriminalitas merupakan salah satu persoalan yang perlu lebih diperhatikan. Berbagai faktor, seperti upah, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, dapat berkontribusi terhadap angka kejahatan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap tingkat kriminalitas, dengan harapan dapat mengidentifikasi pola dan faktor penyebab kejahatan yang lebih mendalam. Memahami interaksi antara tingkat upah dan tingkat kemiskinan sangat penting, karena keduanya sering kali mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Semakin rendah upah dan semakin tinggi kemiskinan, semakin besar kemungkinan terjadinya tindak kriminal. Selain itu, tingkat pendidikan dan pengangguran sangat terkait dengan kesempatan kerja serta kurangnya akses pendidikan berkualitas dapat mengakibatkan tingginya angka pengangguran, yang pada gilirannya meningkatkan risiko kriminalitas. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini tidak hanya untuk memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai dinamika sosial yang ada, tetapi juga untuk

menyusun rekomendasi kebijakan publik yang lebih responsif dan efektif dalam menangani masalah kriminalitas. Dengan pendekatan berbasis data ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih komprehensif untuk membangun lingkungan yang lebih terlindungi dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif merupakan jenis penelitian ini dengan pendekatan desain deskriptif dan analitis. Dalam penelitian ini Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur digunakan sebagai populasi yang akan diteliti dan menggunakan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu serta ketersediaan data atau purposive sampling. Pertama, Upah Minimum, yaitu bayaran terendah bulanan yang mencakup tunjangan, ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja yang berlaku di seluruh wilayah suatu provinsi, ditetapkan setiap tahun oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan, dengan mempertimbangkan kebutuhan layak di tiap provinsi (Shintia & Abbas, 2019). Penelitian ini menggunakan indikator UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Kedua, Tingkat Pendidikan, yaitu standar penerapan pendidikan yang digunakan untuk melihat seberapa partisipasi masyarakat dalam menempuh jenjang pendidikan dengan menggunakan indikator angka partisipasi sekolah usia 19-24 tahun. Ketiga, Tingkat Pengangguran, yaitu persentase angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, mereka yang putus asa mencari pekerjaan dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, terhadap penduduk angkatan kerja (BPS, 2023). Penelitian ini menggunakan indikator TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Keempat, Tingkat Kemiskinan, yaitu penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti sandang, pangan, dan papan, dan yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan indikator Garis Kemiskinan. Variabel-Variabel tersebut merupakan variabel independen yang dianalisis. Tingkat Kriminalitas adalah jumlah total peristiwa kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat dan diterima oleh kepolisian yang berada pada suatu wilayah dan merupakan variabel dependen. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari situs web dan publikasi, dengan sumber data utama dari data yang disajikan BPS. Selanjutnya untuk metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan data panel yang diolah menggunakan alat statistik berupa Eviews 12. Uji t dan uji F digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta signifikansi koefisien regresinya. Penelitian ini berfokus pada kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur sepanjang rentang waktu 2019–2023, yang bertujuan memberikan pemahaman pada hubungan antara berbagai faktor ekonomi dan tingkat terjadinya kriminalitas yang ada di Provinsi Jawa Timur. Berikut disajikan persamaan model regresi yang digunakan, yaitu:

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_{1it}X_{1it} + \beta_{2it}X_{2it} + \beta_{3it}X_{3it} + \beta_{4it}X_{4it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y = Variabel Jumlah Kriminalitas

α_{it} = konstanta

$\beta_{1it}X_{1it}$ = nilai koefisien upah minimum

$\beta_{2it}X_{2it}$ = nilai koefisien tingkat pendidikan

$\beta_{3it}X_{3it}$ = nilai koefisien tingkat pengangguran

$\beta_{4it}X_{4it}$ = nilai koefisien tingkat kemiskinan

ϵ_{it} = error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan model yang tepat dilakukan melalui uji chow dan uji hausman menggunakan Eviews 12, yaitu:

Tabel 1.
Hasil Uji Pemilihan Model

	Prob.	Hasil
Uji Chow	0,0000	<i>Fixed Effect Model</i>
Uji Hausman	0,0000	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian model terbaik, penelitian ini menggunakan model estimasi Fixed Effect Model yang dapat dilihat dari probabilitas Uji Chow sebesar $0,0000 < 0,05$ dan probabilitas Uji Hausman sebesar $0,0000 < 0,05$. Pada kedua uji tersebut mengindikasikan bahwa FEM lebih baik.

Uji Asumsi Klasik

Menurut Napitupulu *et al.* (2021) dilakukan beberapa uji untuk memeriksa asumsi klasik dalam data panel yang dianggap relevan, yaitu uji multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

1. Uji Multikolinearitas

Tabel 2.
Hasil Uji Multikolinearitas

	UMK	APS	TPT	GK
UMK	1,000	0,416	0,511	0,500
APS	0,416	1,000	0,517	0,681
TPT	0,511	0,517	1,000	0,509
GK	0,500	0,681	0,509	1,000

Sumber: Data diolah, 2025

Pada tabel diatas terlihat bahwa nilai koefisien antar variabel $< 0,8$, yang berarti pada data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Prob.
UMK	0,2370
APS	0,3390
TPT	0,3719
GK	0,0664

Sumber: Data diolah, 2025

Pada Uji Glejser yang dilakukan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas, nilai probabilitas menunjukkan $> 0,05$ hal ini berarti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3. Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 4
Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	87,761	14,174	6,192	0,000
UMK	-12,899	1,980	-6,513	0,000
APS	-0,416	0,654	0,636	0,526
TPT	0,619	0,221	2,795	0,005
GK	8,368	1,434	5,834	0,000
Ajusted R-squared				0,550
F-statistic				6,626
Prob(F-statistic)				0,000
Durbin-Watson stat				2,525

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil regresi fixed effect model diatas, maka didapatkan model estimasi regresi linier berganda, yaitu:

$$\text{Crimeit} = 87,761 - 12,899 \text{UMKit} - 0,416 \text{APSit} + 0,619 \text{TPTit} + 8,368 \text{GKit} + \text{eit}$$

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kriminalitas

Variabel Upah Minimum menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil regresi, koefisien untuk indikator Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah sebesar -12,899, yang berarti setiap peningkatan 1 persen Upah Minimum, akan menyebabkan penurunan tingkat kriminalitas sebesar 12,899 kasus di Provinsi Jawa Timur. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Rahman & Prasetyo (2018) dan Hardianto (2009) yang mengungkapkan bahwa upah memiliki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori Anomie Robert K. Merton yaitu jika upah minimum yang rendah berpotensi memperburuk ketegangan sosial dan anomie dalam masyarakat. Ketika individu merasa bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan ekonomi yang sah melalui pekerjaan yang bergaji rendah, mereka mungkin beralih ke cara-cara ilegal, seperti kriminalitas, sebagai bentuk inovasi untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Beauchamp & Chan (2014) juga mendukung temuan ini dengan mengungkapkan bahwa perubahan upah minimum dapat mempengaruhi tingkat kejahatan. Dalam penelitiannya, Beauchamp menemukan bahwa peningkatan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas, terutama ketika potensi keuntungan dari kriminalitas melebihi pendapatan yang diperoleh secara sah.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kriminalitas

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan Tingkat Pendidikan memiliki nilai probabilitas $0,526 > 0,05$ dengan koefisien regresi -0,416. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Berdasarkan teori Anomie oleh Robert K. Merton, peningkatan pendidikan umumnya diharapkan mampu mengurangi angka kriminalitas. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh tersebut tidak signifikan sehingga perubahan tingkat pendidikan tidak secara langsung memengaruhi tingkat kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. Sejalan dengan hasil penelitian oleh Rahmalia *et al.*, (2019b) bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kejahatan di Indonesia, dikarenakan oleh peristiwa yang ada di Indonesia saat ini, di mana mutu pendidikan dianggap masih belum memadai. Ketidakmerataan kualitas pendidikan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu indikator utama masalah ini. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara

variabel tingkat pendidikan terhadap tingkat kriminalitas, yang dapat diamati dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya di Provinsi Jawa Timur. Karena berbagai hambatan, banyak pemuda pada usia 19-24 tidak meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akibat berbagai kendala, seperti keterbatasan biaya, sulitnya akses, minimnya sarana pendidikan, atau rendahnya kemampuan akademis. Berdasarkan data BPS (2024) Angka Partisipasi Sekolah di wilayah perkotaan Provinsi Jawa Timur mencapai 32,09 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan pedesaan yang hanya 18,66 persen. Hal ini disebabkan oleh keberadaan fasilitas pendidikan yang sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Selain itu, sebagian besar pemuda pada kelompok usia ini sudah mulai bekerja atau membangun rumah tangga. Data menunjukkan bahwa 55,84 persen pemuda usia 19-24 tahun bekerja, 7,18 persen mengurus rumah tangga dan hanya 12,10 persen yang melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Dengan kata lain, meskipun tingkat pendidikan mereka terbatas, hal ini tidak secara langsung mendorong mereka untuk terlibat dalam tindakan kriminal.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kriminalitas

Variabel tingkat pengangguran memiliki nilai probabilitas sebesar $0,005 < 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 0,619. Nilai ini memiliki arti bahwa variabel tingkat pengangguran memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kriminalitas. Setiap kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1 persen, maka tingkat kriminalitas di Provinsi Jawa Timur akan bertambah sebanyak 0.619 kasus. Sesuai dengan pendapat Robert K. Merton pada teori Anomie, bahwa tingkat pengangguran yang tinggi dapat mendorong individu untuk mencari alternatif ilegal dalam memenuhi kebutuhannya, terutama ketika kesempatan untuk mencapai tujuan secara sah terbatas. Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Fajri & Rizki (2019) yang mengungkapkan bahwa tingginya pengangguran berpengaruh secara positif signifikan terhadap kejahatan di empat kota Provinsi Aceh. Tingginya angka pengangguran dapat membuat seseorang tidak memiliki pendapatan dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, yang pada akhirnya berpotensi memicu tindakan kriminal (Soraya *et al.*, 2024).

Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Kriminalitas

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan positif terhadap kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. Variabel ini memiliki nilai probabilitas $0,000 < 0,05$ dan koefisien hasil regresi sebesar 8,368, dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 1 persen, maka tingkat kriminalitas di Provinsi Jawa Timur akan meningkat sebanyak 8,368321 kasus. Dalam teori anomie Robert K. Merton dijelaskan bahwa kemiskinan atau keterbatasan akses terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam tindakan kriminal. Hal ini juga diperkuat oleh temuan penelitian Nahe *et al.*, (2024) dan Putriana & Br (2024) bahwa kemiskinan berpengaruh positif signifikan pada tingkat kriminalitas. Keterbatasan ekonomi memaksa individu untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar sehingga sebagian masyarakat miskin memilih pekerjaan ilegal yang berisiko tinggi dengan imbalan lebih besar daripada pekerjaan legal, meskipun mempertaruhkan nyawa (Situmorang, 2024).

Pengaruh Upah, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Secara Simultan Terhadap Kriminalitas

Terdapat nilai F hitung $6,626 > F$ tabel yaitu 2,420 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ pada penelitian ini, yang berarti variabel yaitu upah, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan secara simultan berpengaruh terhadap kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. Selain itu terdapat nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan hasil 0,550 memiliki arti bahwa kemampuan variasi variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota, Angka Partisipasi Sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Garis Kemiskinan dalam menjelaskan variabel kriminalitas yaitu sebesar

54,96 persen sementara 45,04 sisanya dijelaskan oleh variabel lain atau faktor diluar kerangka model penelitian.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan yaitu bahwa variabel upah, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran dan tingkat kriminalitas memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap tingkat kriminalitas. Kemudian untuk upah minimum memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kriminalitas. Peningkatan upah minimum dapat mengurangi tingkat kriminalitas, yang sejalan dengan teori Anomie dari Robert K. Merton. Teori ini mengungkapkan bahwa upah yang rendah dapat menyebabkan ketegangan social, yang pada gilirannya mendorong individu untuk melakukan tindakan illegal. Selain itu tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kriminalitas. Meskipun peningkatan pendidikan umumnya diharapkan dapat mengurangi kriminalitas, faktor seperti keterbatasan biaya dan akses pendidikan pada kelompok usia 19-24 tahun membuat pengaruhnya tidak langsung berhubungan dengan tingkat kriminalitas. Berbeda halnya dengan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan memiliki pengaruh positif terhadap kriminalitas. Setiap peningkatan tingkat pengangguran terbuka menyebabkan peningkatan tingkat kriminalitas, sesuai dengan teori Anomie yang mengungkapkan bahwa ketidakmampuan untuk mencapai tujuan sah dapat mendorong individu untuk terlibat dalam kejahatan, dan setiap peningkatan jumlah penduduk miskin menyebabkan peningkatan tingkat kriminalitas, sesuai dengan teori Anomie yang menunjukkan bahwa kemiskinan dapat memicu tindakan kriminal karena keterbatasan ekonomi mendorong individu untuk mencari alternatif ilegal dengan imbalan lebih besar.

Pemerintah di Provinsi Jawa Timur perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengurangi ketegangan sosial dan kriminalitas dengan meningkatkan upah minimum di berbagai sektor, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup secara legal. Selain itu, peningkatan akses pendidikan untuk kelompok usia 19-24 tahun dengan fasilitas yang lebih terjangkau dan kualitas yang lebih baik akan membantu meningkatkan keterampilan serta peluang kerja yang sah. Kebijakan yang fokus pada pengurangan angka pengangguran, seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penciptaan lapangan pekerjaan juga perlu diimplementasikan untuk mengurangi risiko kriminalitas akibat masalah ekonomi. Di samping itu, meningkatkan program bantuan sosial, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dapat membantu mengurangi dampak kemiskinan yang seringkali menjadi faktor pendorong tindakan kriminal. Dengan demikian, peneliti selanjutnya disarankan mampu menambah variabel lain dan memperluas objek atau waktu penelitian yang diduga memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kriminalitas.

REFERENSI

- Agan, A. Y., & Makowsky, M. D. (2023). The Minimum Wage, EITC, and Criminal Recidivism. *Journal of Human Resources*, 58(5), 1712–1751. <https://doi.org/10.3368/jhr.58.5.1220-11398R1>
- Akbar, G. G., Rustiana, E., & Utama, P. P. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Kabupaten Bandung (Studi di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung). *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(1), 9–16. <https://doi.org/10.36624/jkpk.v11i1.69>
- Anggriawan, S. Y., Soelistyo, A., & Susilowati, D. (2016). Pengaruh Upah Minimum Dan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 218. <https://doi.org/10.22219/jep.v14i2.3893>
- Beauchamp, A., & Chan, S. (2014). The minimum wage and crime. *B.E. Journal of Economic Analysis and Policy*, 14(3), 1213–1235. <https://doi.org/10.1515/bejeap-2013-0130>

- BPS. (2016). Statistik Kriminal 2016 (Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan (ed.)). Badan Pusat Statistik. www.bps.go.id
- BPS. (2021). Booklet Sakernas Survei Angkatan Kerja Nasional. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2024). Statistik Pemuda Jawa Timur 2023 (B. P. J. Timur (ed.)). Badan Pusat Statistik.
- Dari, S. W., & Asnidar, A. (2022). Pengaruh Kepadatan Penduduk, Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kriminalitas. *Niagawan*, 11(1), 68. <https://doi.org/10.24114/niaga.v11i1.32242>
- Dewi, K. A. T., & Piartini, P. S. (2023). Peran Mediasi Kepuasan Konsumen Pada Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Niat Beli Ulang. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(09), 1826-1838. <https://doi.org/10.24843/EEB.2023.v12.i09.p14>
- Dong, B., Egger, P. H., & Guo, Y. (2020). Is poverty the mother of crime? Evidence from homicide rates in China. *PLoS ONE*, 15(5), 1–22. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233034>
- Emanuelle, M. A., & Wenagama, I. W. (2022). Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali Tahun 2011-2020. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(5), 172–187. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i5.426>
- Fajri, R. E., & Rizki, C. Z. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk dan pengangguran terhadap kriminalitas perkotaan Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(3), 255–263. <https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/14940>
- Hardianto, F. N. (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia dari Pendekatan Ekonomi. In *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar* (Vol. 13, Issue 2, pp. 28–41).
- Ibnu, M., Ruslan, M., & Maulana, M. (2023). Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Ditinjau Dari Kriminologi (Perspektif Teori Anomie). 26–38.
- Kesuma, D. A. (2019). Analisis Hubungan Tingkat Kejahatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 1(3), 1–8. <https://doi.org/10.54783/jin.v1i3.416>
- Khairani, R., & Ariesa, Y. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan PUBLIK*, 4(2), 99–110.
- Kuciswara, D., Muslihatinningsih, F., & Santoso, E. (2021). Pengaruh urbanisasi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(3), 1–9. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i3.16307>
- Mahayasa, I. G. A., Wulandari, N. L. A. A., & Sumandi, N. K. (2022). Peran Etika Kerja Hindu Dalam Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Pada Era Revolusi Industri 5.0. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(03), 382-391. <https://doi.org/10.24843/EEB.2022.v11.i03.p11>
- Mervita, E., Eviatun, E., Hasan, S., Hasanuddin, H., & Sari, R. R. (2022). Pengaruh Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Tindakan Kriminal Di Kabupaten Lampung Utara Periode 2012-2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(3), 665–672. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i3.2206>
- Nahe, S. S., Rahman, F., Taqwa, E., Lutfi, M., & Yunus, S. (2024). Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kriminalitas di Sulawesi Tengah Periode 2018-2022. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 6(2), 203–214. <https://jppd.org/index.php/jppd/article/view/177/98>
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. (2021). Penelitian Bisnis : Teknik dan Analisa Data dengan SPSS - STATA - EVIEWS (Vol. 1). https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=T1nJQ0cAAAAJ&citation_for_view=T1nJQ0cAAAAJ:D03iK_w7-QYC
- Priambodo, A. (2024). Peran Kriminalitas Sebagai Pemoderasi Antara Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi. *Al-Kalam : Jurnal Komunikasi, Bisnis dan Manajemen*, 11(1), 132. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v11i1.11985>
- Putri, E. M., & Putri, D. Z. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(2), 106. <https://doi.org/10.24036/ecosains.11564057.00>
- Putriana, M., & Br, M. (2024). The Effect of HDI , Population Density , Poverty , and Income Inequality on Criminality in DKI Jakarta Province. 12(November), 94–101. <https://doi.org/10.33019/equity.v>
- Ragil Budi Guritno, A. R. (2022). Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Penurunan Kriminalitas Di Provinsi Jawa Tengah: Analisis Mikroekonomi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(1), 12. <https://doi.org/10.35879/jik.v16i1.349>
- Rahmalia, S., Ariusni, & Triani, M. (2019a). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1, 21–36. [file:///C:/Users/A V I T A/Downloads/5345-9529-1-SM.pdf](file:///C:/Users/A%20V%20I%20T%20A/Downloads/5345-9529-1-SM.pdf)
- Rahmalia, S., Ariusni, & Triani, M. (2019b). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas*, 1, 21–36.
- Rahman, Y. A., & Prasetyo, A. D. (2018). Economics and Crime Rates in Indonesia. *Jejak*, 11(2), 401–412. <https://doi.org/10.15294/jejak.v11i2.16060>

- Sabiq, R. M., & Apsari, N. C. (2021). Dampak Pengangguran Terhadap Tindakan Kriminal Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 51. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31973>
- Sanjaya, H., & Marhaeni, A. A. I. N. (2023). Analisis Determinan Lama Menganggur Tenaga Kerja Terdidik di Kabupaten Badung Pada Masa Pandemi Covid-19. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(06), 1046-1057. <https://doi.org/10.24843/EEB.2023.v12.i06.p03>
- Saputra, R. (2023). Analisis Tingkat Pendidikan, Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas di Bekasi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 3(4), 159–163. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i4.1677>
- Setiawan, K., Haikal, M., Wicaksana, A. G., & Dermawan, D. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi TPT di provinsi Banten 2017-2021. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE)*, 2(1), 107–120. <https://prin.or.id/index.php/JURRIE/article/download/1112/1189>
- Shintia, N., & Abbas, S. (2019). Penetapan Upah Minimum di Provinsi Aceh. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(1), 164. <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i1.5091>
- Silvia, & Ikhsan. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Kepadatan Penduduk terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 23–30. <https://doi.org/10.24815/jimekp.v6i1.18566>
- Situmorang, S. E. (2024). Pengaruh Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas Indonesia Pada Tahun 2022. 2(2), 1621–1628. <https://doi.org/10.69718/jjesm.v2i2.223>
- Soraya, N., Nurfikri, M. A., Rafi, A., & Kurniawan, M. (2024). Pengaruh Ketimpangan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2013-2023 Data Registrasi Polri Kejadian Kejahatan Di Indonesia Periode 2012-2023 Menurut Statistik Kriminalit. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 270–284. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.980>
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi : Teori pengantar (Ketiga)*. Rajawali pers.
- Suryani, B. (2023). *Kriminologi*. Universitas Medan Area Press.
- Winda, N., & Sentosa, S. U. (2021). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Tindakan Kriminalitas di Provinsi-Provinsi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 3(4), 65. <https://doi.org/10.24036/jkep.v3i4.12376>
- Zahra, I., & Usman, U. (2023). Pengaruh Variabel Ekonomi terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 12, 17–25. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomika%0A>